Jurnal Sains Teh dan Kina
Pusat Penelitian Teh dan Kina

*Research Article*

# Pola Kemitraan Usahatani Teh di Lahan Perkebunan dan Kehutanan

## Tea Farming Partnership Patterns on Plantation and Forestry Land

**Dwi Wahyuningsih [1*] and Kralawi Sita [2]**

[1]Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret
[2]Departemen Sosial Ekonomi, Pusat Penelitian Teh dan Kina
* Correspondence: dwiwahyuningsih225@student.uns.ac.id

***Abstract:*** *Tea is a strategic plantation commodity in Indonesia whose management increasingly involves partnership arrangements between farmers and land management institutions to support sustainable land utilization. Differences in land status between plantation and forest areas are assumed to influence the form and mechanisms of partnerships implemented. This study aimed to analyze and compare tea farming partnership patterns across these two land functions. A qualitative descriptive approach with a comparative study design was conducted in the PPTK PT RPN plantation area and the PT Perhutani forest partnership area in Bandung Regency, West Java. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, and analyzed using an interactive qualitative analysis model. The results indicate that partnerships on plantation land have developed into a more structured contract farming system characterized by technical support and greater management flexibility. In contrast, partnerships on forest land have evolved through long-term profit-sharing arrangements regulated by forestry policies, emphasizing ecological sustainability. These findings demonstrate that land status and function play an important role in shaping institutional structures and management orientations in tea farming partnerships.*

***Keywords:*** *tea farming, agribusiness partnership, contract farming, plantation land, forest land.*

Received: 10 Juni 2026
Accepted: 22 September 2026
Published: 4 November 2026

Jurnal Sains Teh dan Kina Pusat Penelitian Teh dan Kina Desa Mekarsari, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Jawa Barat 40972
redaksijptk@gmail.com
+62 22 5928186.

**Abstrak:** Teh merupakan komoditas perkebunan strategis di Indonesia yang pengelolaannya semakin berkembang melalui pola kemitraan antara petani dan institusi pengelola lahan untuk mendukung pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Perbedaan status lahan perkebunan dan kehutanan diduga memengaruhi bentuk serta mekanisme kemitraan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pola kemitraan usahatani teh pada kedua fungsi lahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi komparatif di wilayah PPTK PT RPN dan kawasan kemitraan PT Perhutani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pada lahan perkebunan berkembang menjadi sistem *contract farming* yang lebih terstruktur dengan dukungan teknis dan fleksibilitas pengelolaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kemitraan pada lahan kehutanan berlangsung secara turun-temurun melalui sistem bagi hasil yang diatur regulasi kehutanan dan lebih menekankan keberlanjutan ekologi. Temuan ini menunjukkan bahwa status dan fungsi lahan berperan penting dalam membentuk struktur kelembagaan dan orientasi pengelolaan usahatani teh.

**Kata Kunci:** usahatani teh, kemitraan agribisnis, *contract farming*, lahan perkebunan, lahan kehutanan.

## 1. Pendahuluan

Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi pedesaan serta pengembangan sektor agroindustri. Data Kementerian Pertanian (2026) mencatat subsektor perkebunan menyerap tenaga kerja terbesar kedua dalam sektor pertanian setelah tanaman pangan dengan angka sebesar 10,33 juta tenaga kerja. Subsektor ini juga menjadi kontributor terbesar dalam sektor pertanian karena menyumbang 4,51% terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada tahun 2025 (BPS, 2026). Meskipun BPS tidak mempublikasikan kontribusi teh secara terpisah dari subsektor perkebunan, signifikansinya tergambar dari nilai tambah bruto teh yang mencapai sekitar Rp5 triliun pada 2024 dengan keterlibatan lebih dari 170.000 petani di 13 provinsi penghasil teh (Media Perkebunan, 2026). Pengelolaan komoditas teh melibatkan berbagai aktor, termasuk perusahaan perkebunan, pengelola kawasan hutan, dan petani sebagai pelaku utama kegiatan budidaya. Dalam praktiknya, keterlibatan petani dalam pengelolaan lahan teh didorong untuk berkembang melalui pola kemitraan, sebagaimana diatur dalam kerangka regulasi seperti UU No. 39 Tahun 2014 dan Permentan No. 18 Tahun 2021. Pola kemitraan ini menjadi salah satu pendekatan kelembagaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar wilayah usaha (Laelasari et al., 2024).

Secara konseptual, kemitraan agribisnis dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) yang menghubungkan perusahaan dan petani melalui kesepakatan kerja sama produksi (Eaton & Shepherd, 2001). Dalam perspektif contract farming, kemitraan berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian produksi dan pasar melalui pembagian peran, tanggung jawab, serta risiko antar pelaku usaha. Perusahaan umumnya menyediakan akses terhadap input, teknologi, dan jaminan pemasaran, sementara petani berperan sebagai pelaksana kegiatan budidaya (Ton et al., 2018). Pendekatan ini juga dipandang sebagai mekanisme koordinasi vertikal yang mampu menekan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperkuat stabilitas hubungan produksi dalam sistem agribisnis (Sita et al., 2018; Halik et al., 2020). Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa kemitraan juga dapat menimbulkan ketergantungan struktural apabila pembagian hak dan kewajiban tidak berlangsung secara seimbang, sehingga aspek kelembagaan menjadi faktor kunci keberhasilan kerja sama.

Implementasi kemitraan menjadi lebih kompleks ketika diterapkan pada lahan dengan fungsi yang berbeda, yaitu lahan perkebunan dan kawasan kehutanan. Pada lahan perkebunan, kemitraan umumnya berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan areal usaha serta pemberdayaan masyarakat sekitar, sebagaimana didorong oleh kebijakan sektor perkebunan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari total luas areal yang diusahakan. Sementara itu, pada kawasan kehutanan, pola kemitraan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan fungsi hutan. Sejalan dengan kebijakan kehutanan nasional yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021. Perbedaan status dan regulasi lahan tersebut memengaruhi bentuk kesepakatan, mekanisme kerja sama, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak (Zhang dan Dong, 2025).

Dalam konteks ini, PPTK PT RPN berperan dalam pengelolaan komoditas teh pada lahan perkebunan, sedangkan PT Perhutani mengelola kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya teh melalui skema kemitraan. Pemanfaatan lahan kehutanan memungkinkan kegiatan produksi berlangsung tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan, sehingga menghasilkan karakteristik kemitraan yang berbeda dibandingkan dengan sistem perkebunan. Variasi kelembagaan tersebut menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana perbedaan fungsi lahan membentuk pola hubungan kerja sama antara perusahaan dan petani.

Penelitian mengenai kemitraan pada sektor perkebunan umumnya masih berfokus pada aspek produksi atau kinerja ekonomi, sementara kajian yang secara khusus membandingkan pola kemitraan pada dua fungsi lahan yang berbeda, yaitu perkebunan dan kehutanan, masih terbatas. Padahal, pemahaman terhadap variasi pola kemitraan penting untuk menjelaskan dinamika hubungan kelembagaan, mekanisme kerja sama, serta implikasinya terhadap pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kemitraan usahatani teh yang diterapkan pada lahan perkebunan dan kehutanan serta mengidentifikasi perbedaan mekanisme kemitraan yang terbentuk pada kedua sistem tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan karakteristik kemitraan usahatani teh pada berbagai fungsi lahan, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan model kemitraan yang adaptif dan berkelanjutan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi komparatif untuk menganalisis pola kemitraan usahatani teh pada dua fungsi lahan yang berbeda, yaitu lahan perkebunan dan kawasan kehutanan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam mekanisme kemitraan, bentuk kesepakatan kerja sama, serta pembagian peran dan tanggung jawab antara perusahaan dan petani mitra, sekaligus membandingkan karakteristik kelembagaan kemitraan yang terbentuk pada masing-masing sistem pengelolaan lahan. Penelitian dilaksanakan di dua sentra budidaya teh di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yaitu Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu yang merupakan wilayah pengelolaan PPTK PT RPN, serta Laspada, Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan pada kawasan kemitraan PT Perhutani. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan adanya penerapan pola kemitraan usahatani teh pada kedua wilayah dengan status lahan yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan pada Januari–Februari 2026.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kemitraan, yaitu petani mitra pada masing-masing sistem pengelolaan lahan. Informasi yang dihimpun meliputi proses pembentukan kemitraan, mekanisme pelaksanaan kerja sama, pengaturan hak dan kewajiban, serta praktik pengelolaan lahan dalam kerangka kemitraan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, laporan internal, arsip institusi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan kemitraan pada sektor perkebunan dan kehutanan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai implementasi kemitraan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Analisis difokuskan pada identifikasi struktur kemitraan, mekanisme hubungan kerja sama, serta perbandingan karakteristik kelembagaan antara kemitraan pada lahan perkebunan dan kehutanan. Seluruh data yang mendukung temuan penelitian tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis dengan mempertimbangkan batasan akses terhadap dokumen institusional yang bersifat internal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### *3.1 Latar Belakang Historis Pola Kemitraan*

Latar belakang historis pola kemitraan usahatani teh di lokasi penelitian menunjukkan perbedaan yang nyata antara lahan perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan, kemitraan antara petani dan PPTK PT RPN telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun dan berkembang melalui skema contract farming. Skema ini terbentuk seiring dengan kebutuhan optimalisasi lahan perkebunan untuk mendukung kegiatan produksi dan penelitian komoditas teh. Dalam pola tersebut, petani memperoleh akses pengelolaan lahan dengan dukungan teknis dari pihak PPTK, sementara hasil produksi teh diserap oleh mitra sesuai kesepakatan.

Kemitraan antara petani dan PPTK PT RPN berkembang dari kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas teh yang telah berlangsung dalam jangka panjang. Pola kemitraan ini cenderung bersifat formal dan terstruktur, dengan dukungan teknis serta pendampingan produksi dari pihak mitra. Model kemitraan seperti ini umum diterapkan pada sektor perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan usaha (Ton et al., 2018; Hariance et al., 2020). Petani mitra memiliki peran aktif dalam pengelolaan lahan dengan tingkat fleksibilitas dalam penentuan komoditas tanaman tumpangsari yang relatif tinggi.

Hasil wawancara dan dokumentasi lapangan juga menunjukkan bahwa kemitraan pada lahan kehutanan PT Perhutani memiliki latar belakang historis yang jauh lebih panjang dan bersifat turun-temurun. Petani mitra telah mengelola lahan selama sekitar 60 tahun dengan komoditas utama berupa teh dan kopi pada kawasan hutan negara. Pola kemitraan ini berkembang secara bertahap melalui sistem bagi hasil sebagai mekanisme legal pemanfaatan lahan kehutanan. Hubungan jangka panjang antara petani dan pemilik lahan membentuk pola pengelolaan yang relatif stabil, namun dengan fleksibilitas pengambilan keputusan yang lebih terbatas akibat regulasi kehutanan.

Kemitraan pada lahan kehutanan PT Perhutani berangkat dari sejarah pemanfaatan kawasan hutan melalui skema kerja sama kehutanan. Skema ini menekankan pemanfaatan lahan tanpa mengubah fungsi pokok hutan, sehingga pengelolaan lahan dibatasi oleh regulasi kehutanan (Zhang & Dong, 2025). Pengelolaan lahan yang telah berlangsung secara turun-temurun membentuk hubungan sosial yang kuat antara petani dan lahan garapan. Karakteristik ini menyebabkan kemitraan kehutanan lebih menekankan aspek keberlanjutan ekologi dibandingkan intensifikasi produksi (Eaton & Shepherd, 2001).

Perbedaan sejarah pengelolaan lahan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan tersebut memengaruhi karakter kemitraan yang diterapkan pada masing-masing lokasi. Kemitraan perkebunan cenderung lebih formal dan berorientasi pada produktivitas usaha, sedangkan kemitraan kehutanan lebih menekankan aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap fungsi kawasan hutan. Kondisi ini menjadi dasar munculnya variasi sistem pengelolaan lahan dan pola tanam pada masing-masing lokasi.

*3.2 Karakteristik Pola Tanam dalam Pola Kemitraan*

Pola kemitraan yang diterapkan pada lahan perkebunan dan kehutanan tidak hanya mengatur hubungan kelembagaan antar pihak, tetapi juga memengaruhi sistem pengelolaan lahan dan pengaturan waktu tanam berbagai komoditas. Dalam praktiknya, kemitraan menentukan fleksibilitas petani dalam mengombinasikan tanaman utama dan tanaman sela sesuai dengan karakteristik lahan dan kesepakatan kerja sama. Sistem tumpangsari pada lahan perkebunan dan agroforestri pada lahan kehutanan mendorong perbedaan strategi pengelolaan tanaman sepanjang tahun. Pengaturan kalender tanam menjadi penting untuk menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani. Kalender tanam berbagai komoditas pada sistem kemitraan di lahan perkebunan dan kehutanan disajikan pada Tabel 1. Kalender Tanam Tanaman Perkebunan, Kehutanan, dan Hortikultura dalam Pola Kemitraan Usahatani Teh berikut.

**Tabel 1.** Kalender Tanam Tanaman Perkebunan, Kehutanan, dan Hortikultura dalam Pola Kemitran Usahatani Teh

| Tanaman | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkebunan | | | | | | | | | | | | |
| • Teh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • Kopi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kehutanan | | | | | | | | | | | | |
| • Pinus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hortikultura | | | | | | | | | | | | |
| • Tomat | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| • Cabai Rawit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| • Kol | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |

Sumber: Data Primer Wawancara

Berdasarkan Tabel 1, tanaman perkebunan seperti teh dan kopi dikelola secara berkelanjutan sepanjang tahun, yang mencerminkan karakter tanaman tahunan dan peranannya sebagai komoditas utama dalam sistem kemitraan. Pola ini sejalan dengan temuan Sita et al., (2018) dan Ton et al., (2018) yang menyatakan bahwa kemitraan pada komoditas perkebunan cenderung berorientasi pada kesinambungan produksi jangka panjang. Pada lahan perkebunan PPTK PT RPN, fleksibilitas kemitraan memungkinkan petani memadukan tanaman teh dengan tanaman hortikultura tanpa mengganggu siklus produksi utama.

Pada lahan kehutanan PT Perhutani, keberadaan tanaman pinus yang dikelola sepanjang tahun menunjukkan bahwa pola kemitraan kehutanan menempatkan fungsi ekologis dan keberlanjutan lahan sebagai prioritas utama. Sistem agroforestri memungkinkan tanaman kopi dan hortikultura tumbuh di bawah tegakan tanpa mengubah fungsi kawasan hutan. Kondisi ini sejalan dengan Evizal dan Prasmatiwi (2023) yang menyatakan bahwa agroforestri berperan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi produksi dan konservasi. Namun, pengelolaan tanaman sela pada lahan kehutanan relatif lebih dibatasi dibandingkan lahan perkebunan.

Tanaman hortikultura seperti tomat, cabai rawit, dan kol menunjukkan pola tanam yang bersifat musiman dan berulang dalam satu tahun. Pola ini mencerminkan strategi petani dalam memanfaatkan sela waktu tanam untuk memperoleh pendapatan jangka pendek. Ariani dan Rifin (2017) serta Hariance et al., (2020) menjelaskan bahwa tanaman hortikultura sering dimanfaatkan dalam sistem tumpangsari untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan dan efisiensi tenaga kerja. Dalam konteks kemitraan, keberadaan tanaman hortikultura memperkuat peran kemitraan sebagai sarana diversifikasi pendapatan petani.

Secara keseluruhan, kalender tanam pada Tabel 1, menunjukkan bahwa pola kemitraan di lahan perkebunan dan kehutanan berpengaruh terhadap strategi pengelolaan tanaman sepanjang tahun. Kemitraan perkebunan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan pola tanam, sedangkan kemitraan kehutanan lebih menekankan pengelolaan yang terkontrol dan berorientasi keberlanjutan. Perbedaan ini menjadi dasar untuk menilai bagaimana pola kemitraan memengaruhi agronomi dan efisiensi usahatani teh.

3.3 *Kondisi Agronomi Tanaman Teh di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)*

Kondisi agronomi tanaman teh merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi produktivitas dan kinerja usahatani. Perbedaan sistem pengelolaan lahan dan pola tanam dalam pola kemitraan berpotensi menimbulkan variasi karakter pertumbuhan tanaman. Pada sistem tumpangsari dan agroforestri, interaksi antar tanaman serta intensitas pengelolaan lahan dapat memengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman teh. Oleh karena itu, analisis kondisi agronomi diperlukan untuk memberikan gambaran awal mengenai respon tanaman teh terhadap pola tanam yang diterapkan dalam kemitraan. Untuk memberikan gambaran konteks lokasi penelitian, ditampilkan kondisi ekosistem lahan perkebunan dan kehutanan yang menjadi lokasi usahatani teh. Perbedaan karakteristik lahan ini menjadi dasar dalam memahami variasi pola kemitraan, sistem pengelolaan, serta kinerja agronomi dan ekonomi usahatani teh. Pengukuran kondisi agronomi tanaman teh dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data pertumbuhan yang representatif. Dokumentasi dan tabel berikut menunjukkan perbedaan ekosistem teh di kedua lokasi.




(a) (b)

**Gambar 1.** Perbedaan ekosistem teh pada lahan perkebunan dan lahan kehutanan:
(a) Ekosistem lahan perkebunan tanaman teh dengan hortikultura; (b) Ekosistem lahan kehutanan tanaman teh dengan kopi

**Tabel 2**. Gambaran Kondisi Agronomi Tanaman Teh di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)

| Pola Tanam | Tahun Tanam | Lingkar Batang (Cm) | Lingkar Cabang (Cm) | Tinggi Tanaman (Cm) | Tinggi Bidang Petik (Cm) | Lebar Bidang Petik (Cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumpangsari dengan cabai | 2023 | 3,30 ± 0,32 | 1,89 ± 0,24 | 66,00 ± 7,35 | 35,60 ± 4,45 | 63,8 ± 5,02 |
| Agroforestri dengan Kopi | 2007 | 6,48 ± 1,15 | 4,18 ± 0,90 | 69,80 ± 6,38 | 37,40 ± 6,91 | 73,2 ± 22,24 |

Sumber: Data Primer Observasi Lapangan

Tabel 2, menunjukkan adanya perbedaan kondisi agronomi tanaman teh antara sistem tumpangsari dengan cabai dan sistem agroforestri melalui tumpangsari kopi. Kedua sistem menggunakan tanaman teh pada fase tanaman menghasilkan (TM), sehingga perbedaan karakter agronomi yang muncul tidak berkaitan dengan fase pertumbuhan, melainkan dengan perbedaan umur tanaman dalam fase produktif tersebut. Tanaman teh pada sistem agroforestri dan tumpangsari kopi memiliki lingkar batang dan lingkar cabang yang lebih besar dibandingkan sistem tumpangsari cabai. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanaman dengan umur produktif lebih tua mengalami akumulasi pertumbuhan vegetatif yang lebih tinggi, sehingga perkembangan diameter batang dan cabang menjadi lebih optimal (Ariani & Rifin, 2017; Trimerani et al., 2019).

Meskipun demikian, tinggi tanaman dan tinggi bidang petik pada kedua pola tanam relatif tidak berbeda nyata. Nilai yang cenderung seragam mengindikasikan bahwa praktik pemangkasan dan pemetikan pada lokasi kemitraan dilakukan secara konsisten sehingga tinggi tanaman tetap berada pada kisaran optimal tanaman menghasilkan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan agronomi berperan penting dalam menjaga stabilitas struktur tanaman, meskipun terdapat perbedaan umur tanaman antar sistem budidaya (Halik et al., 2020).

Lebar bidang petik pada sistem agroforestri dan tumpangsari kopi tercatat lebih besar dengan tingkat variasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem tumpangsari cabai. Variabilitas tersebut mencerminkan heterogenitas pertumbuhan

tanaman teh pada sistem agroforestri yang umumnya terdiri atas tanaman dengan umur lebih tua dan kondisi lingkungan yang lebih beragam. Interaksi naungan, jarak tanam, serta kompetisi antar tanaman membentuk struktur tajuk yang lebih kompleks, sehingga menghasilkan variasi ukuran bidang petik antar individu tanaman (Zhang & Dong, 2025).

Secara umum, hasil pengukuran menunjukkan bahwa umur tanaman dalam fase tanaman menghasilkan menjadi faktor dominan yang memengaruhi variasi karakter pertumbuhan tanaman teh. Oleh karena itu, interpretasi perbedaan kinerja agronomi dan ekonomi usahatani teh perlu mempertimbangkan faktor umur tanaman agar pengaruh pola tanam tidak ditafsirkan secara berlebihan tanpa memperhatikan dinamika pertumbuhan tanaman produktif.

Selain faktor umur, pola tanam juga berpotensi memengaruhi kondisi agronomi melalui pembentukan mikroklimat. Sistem agroforestri dan tumpangsari kopi cenderung menciptakan lingkungan tumbuh yang lebih stabil melalui pengaturan naungan dan peningkatan kelembapan tanah, yang dapat mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman teh dibandingkan sistem tumpangsari dengan tanaman semusim. Penelitian Zhang dan Dong (2025) menunjukkan bahwa sistem agroforestri intercropping mampu meningkatkan ketersediaan nutrien dan aktivitas biologis tanah sehingga mendukung performa pertumbuhan tanaman teh di lapangan.

Namun demikian, data agronomi dalam penelitian ini berfungsi sebagai informasi kontekstual untuk menggambarkan kondisi lapangan dan tidak digunakan sebagai dasar analisis pertumbuhan tanaman secara kuantitatif. Fokus utama penelitian tetap diarahkan pada analisis pola kemitraan dan kinerja usahatani teh, sehingga kondisi agronomi tanaman diposisikan sebagai faktor pendukung dalam memperkuat interpretasi hasil penelitian.

### *3.4 Perbandingan Pola Kemitraan di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)*

Pola kemitraan merupakan kerangka utama dalam pengelolaan usahatani teh pada lahan perkebunan dan kehutanan. Setiap pola kemitraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembagian peran, tanggung jawab, dan risiko usaha. Perbedaan tersebut memengaruhi fleksibilitas pengelolaan usahatani oleh petani. Pemahaman terhadap pola kemitraan penting untuk menilai keberlanjutan kerja sama. Analisis hasil penelitian difokuskan pada perbandingan pola kemitraan usahatani teh antara petani mitra PPTK PT RPN dan petani mitra PT Perhutani. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik kemitraan berdasarkan aspek kontrak, sumber input dan output, partisipasi petani, pengelolaan lahan, serta skala usahatani. Ringkasan perbedaan pola kemitraan kedua model kerja sama tersebut disajikan pada Tabel 3. Perbandingan Pola Kemitraan Usahatani Teh di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani) berikut.

**Tabel 3.** Perbandingan Pola Kemitraan Usahatani Teh di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)

| Tipe Kemitraan | Karakteristik | Komponen (di Lahan Perkebunan/PPTK PT RPN) | Komponen (di Lahan Kehutanan/PT Perhutani) |
|---|---|---|---|
| Kontrak | a. Kontrak verbal atau kerangka hukum lisan (percobaan awal)<br>b. Kontrak lisan meningkat menjadi kontrak tertulis<br>c. Kerangka hukum kontrak tertulis diterbitkan pada bulan Januari 2015 | • Tahap awal, kemitraan dijalankan secara informal sebagai uji coba pemanfaatan lahan dengan sistem tumpangsari.<br>• Perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.<br>• Perjanjian tertulis formal berupa MoU KSO yang diterbitkan sejak tahun 2015 sebagai dasar legalitas kerja sama. | • Tahap awal, dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan dengan prinsip saling menjaga.<br>• Perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban.<br>• Kerja sama formal melalui MoU dengan sistem bagi hasil sebesar 20% hasil panen.<br>• Kontrak jangka panjang (5–10 tahun, 35 tahun dan seumur hidup). |
| Sumber *input/ output* | a. *Input – output* bagi mitra (petani) | • *Input*: Tenaga kerja, pengelolaan lahan, investasi bibit teh Rp14.000.000/Ha/tahun, dan sarana produksi usahatani.<br>• *Output*: Pendapatan dari tanaman tumpangsari (hortikultura). | • *Input*: Tenaga kerja, sarana produksi, biaya pemeliharaan, 20% hasil panen untuk bagi hasil, dan upah tenaga kerja.<br>• *Output*: Pendapatan dari produksi teh, kopi, dan sayuran tumpangsari. |
| | b. *Input – output* bagi pemilik lahan | • *Input*: Penyediaan lahan milik negara, penyediaan bibit teh, dukungan teknis melalui demplot pupuk, serta dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan kemitraan.<br>• *Output*: Hasil produksi teh. | • *Input*: Penyediaan lahan negara dan tanaman kehutanan (rasamala, pinus, suren).<br>• *Output*: Bagi hasil sebesar 20% dari hasil panen petani dan terjaganya fungsi hutan dan kelestarian tanaman keras. |
| Partisipasi | Kriteria petani peserta bermitra dalam pertanian kontrak | • Petani lokal yang bersedia mematuhi perjanjian kemitraan, mampu mengelola lahan dengan sistem tumpangsari, bertanggung jawab. | • Petani berpengalaman, mampu mengelola lahan dengan sistem agroforestri, bersedia menjaga tanaman kehutanan, dan mematuhi perjanjian. |
| Lahan | Pemanfaatan lahan untuk pertanian kontrak | • Lahan milik negara yang dikelola oleh PPTK PT RPN.<br>• Lahan dimanfaatkan petani mitra melalui kerja sama (MoU KSO) untuk usahatani teh sistem tumpangsari.<br>• Petani memiliki hak kelola lahan selama masa kontrak berlangsung, tetapi kepemilikan lahan tetap berada pada PPTK PT RPN. | • Lahan milik negara yang dikelola oleh PT Perhutani.<br>• Lahan dimanfaatkan oleh petani mitra melalui perjanjian kerja sama untuk kegiatan usahatani.<br>• Petani memiliki hak kelola lahan selama masa kontrak berlangsung, tetapi kepemilikan lahan tetap berada pada PT Perhutani. |
| Skala | Perluasan pertanian kontrak | • Pengembangan pola *contract farming* dilakukan terbatas dan bertahap sesuai dengan ketersediaan lahan dan kapasitas pengelolaan petani mitra.<br>• Skala usahatani yang diterapkan tergolong kecil hingga menengah, dengan luas lahan rata-rata ±1 Ha per petani.<br>• Ekspansi kemitraan lebih difokuskan pada optimalisasi lahan dan peningkatan pendapatan petani | • Skala usahatani tergolong menengah hingga besar.<br>• Usahatani teh dikelola secara kelompok dengan luas ±13 Ha (13 petani, masing-masing 1 Ha).<br>• Ekspansi kemitraan lebih difokuskan pada optimalisasi lahan dan peningkatan pendapatan petani melalui sistem agroforestri. |

Sumber: Data Primer Wawancara

Berdasarkan Tabel 3, pola kemitraan pada PPTK PT RPN menunjukkan bahwa pada tahap awal kerja sama belum terdapat perjanjian yang terlalu mengikat atau formal. Kemitraan diawali dengan kesepakatan informal sebagai tahap uji coba sebelum berkembang menjadi perjanjian tertulis formal melalui MoU KSO. Pola ini memberikan ruang adaptasi bagi petani dan perusahaan untuk menilai kelayakan kerja sama sebelum masuk ke tahap kontraktual yang lebih mengikat. Model kemitraan bertahap seperti ini umum diterapkan pada sistem contract farming perkebunan karena mampu menurunkan risiko awal bagi kedua pihak (Sita et al., 2018).

Pola tersebut juga tidak terlepas dari karakteristik pengelolaan lahan perkebunan yang mendorong keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan produksi. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20% dari total luas areal yang diusahakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kemitraan antara perusahaan dan petani bukan hanya didorong oleh pertimbangan efisiensi usaha, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya lahan serta meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar wilayah perkebunan. Dengan demikian, kemitraan pada PPTK PT RPN dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kelembagaan yang sekaligus memenuhi aspek operasional dan regulatif dalam pengelolaan lahan perkebunan.

Sebaliknya, pola kemitraan dengan PT Perhutani sejak awal dilaksanakan melalui kesepakatan yang lebih terstruktur karena berkaitan dengan pengelolaan lahan kehutanan negara. Kerja sama dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) formal dengan sistem bagi hasil, sebesar 20% dari seluruh hasil panen. Selain berorientasi pada produksi, kemitraan ini juga menekankan aspek konservasi dan keberlanjutan fungsi hutan. Penekanan tersebut sejalan dengan kebijakan kehutanan nasional yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kepastian hukum pemanfaatan kawasan hutan, serta penguatan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis kehutanan. Dengan demikian, perbedaan status dan fungsi lahan berpengaruh terhadap bentuk, mekanisme, dan ketentuan kemitraan yang diterapkan.

Dari sisi input dan output, kemitraan PPTK PT RPN menempatkan petani sebagai penyedia utama tenaga kerja dan pengelola lahan, dengan dukungan investasi bibit dan sarana produksi dari perusahaan. Output yang dihasilkan berupa pendapatan dari tanaman tumpangsari hortikultura. Sementara itu, pada kemitraan PT Perhutani, input mencakup tenaga kerja, sarana produksi, serta biaya pemeliharaan, dengan output berupa hasil produksi teh, kopi, dan tanaman tumpangsari lainnya. Perbedaan ini mencerminkan orientasi pengelolaan lahan perkebunan yang lebih intensif dibandingkan lahan kehutanan yang memiliki fungsi multipurpose.

Partisipasi petani dalam kedua pola kemitraan mensyaratkan kemampuan teknis dan kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama. Petani mitra PPTK PT RPN umumnya adalah petani lokal yang mampu mengelola lahan tumpangsari dan bersedia mengikuti ketentuan kontrak. Pada kemitraan PT Perhutani, petani dituntut memiliki pengalaman dalam sistem agroforestri serta komitmen menjaga tanaman kehutanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan contract farming sangat dipengaruhi oleh kapasitas petani dan kejelasan peran dalam kontrak kerja sama (Erfit, 2025).

Dari aspek pengelolaan lahan, petani pada kedua kemitraan memiliki hak kelola selama masa kontrak, namun kepemilikan lahan tetap berada pada institusi pengelola. Pada PPTK PT RPN, pengelolaan lahan difokuskan pada optimalisasi produksi teh dan tumpangsari. Sementara itu, pada PT Perhutani, pengelolaan lahan dibatasi oleh regulasi kehutanan yang menekankan perlindungan lingkungan. Perbedaan ini berdampak pada skala dan arah pengembangan usahatani.

Dilihat dari skala usaha, kemitraan PPTK PT RPN umumnya berada pada skala kecil hingga menengah dengan luas lahan relatif terbatas, sedangkan kemitraan PT Perhutani memiliki potensi skala yang lebih besar namun dengan pembatasan fungsi lahan. Ekspansi kemitraan pada PPTK PT RPN lebih diarahkan pada peningkatan pendapatan petani melalui optimalisasi lahan, sementara pada PT Perhutani difokuskan pada peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan kelestarian hutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan perbedaan pola kemitraan terlihat pada aspek kontrak kerja sama, penyediaan input dan output, serta partisipasi petani dalam pengambilan keputusan. Pada kemitraan dengan PPTK PT RPN, hubungan kerja sama umumnya lebih terstruktur melalui kesepakatan formal, sehingga petani memperoleh kejelasan akses input dan pemasaran hasil. Model kemitraan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi dan stabilitas usaha petani (Trimerani et al., 2021; Hariance et al., 2020).

Sebaliknya, pada kemitraan PT Perhutani, petani berperan sebagai pengelola lahan dengan keterbatasan tertentu dalam pengambilan keputusan. Penyediaan input dan sistem pemasaran hasil lebih bergantung pada inisiatif petani. Pola

ini menunjukkan bahwa kemitraan kehutanan memiliki karakter yang berbeda dengan kemitraan perkebunan, terutama dalam aspek kelembagaan dan pengelolaan sumber daya (Eaton & Shepherd, 2001).

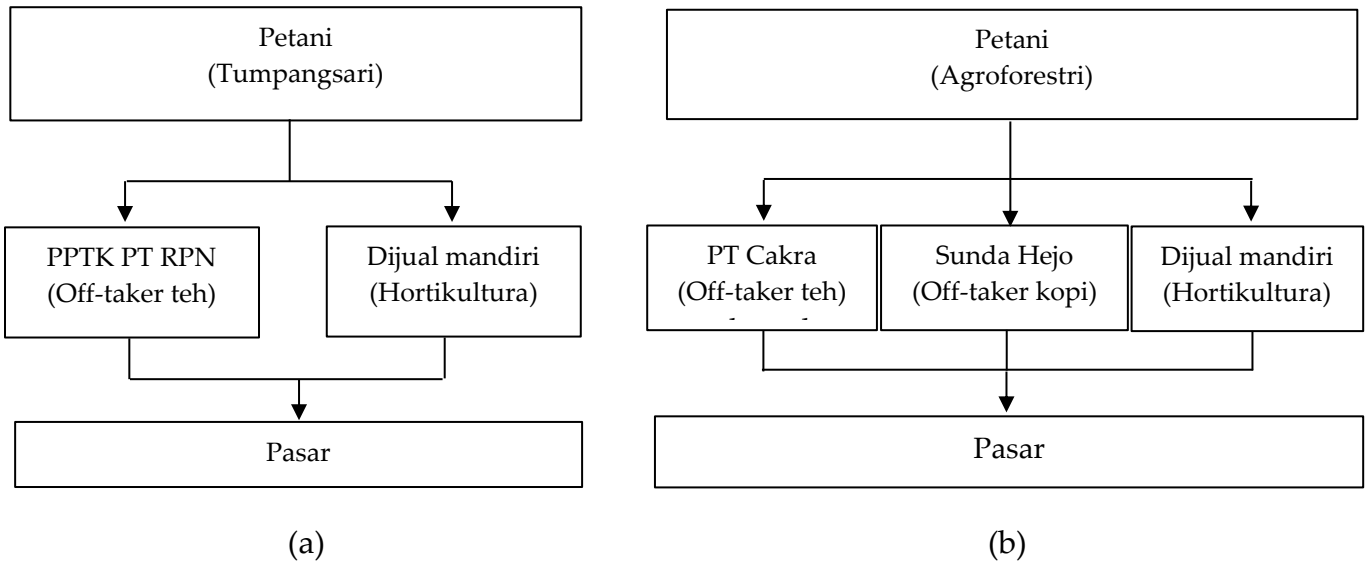
*3.5 Struktur Rantai Pasok dalam Pola Kemitraan di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)*

Pola kemitraan usahatani teh tidak hanya membentuk hubungan kelembagaan antara petani dan pengelola lahan, tetapi juga menentukan struktur rantai pasok serta mekanisme pemasaran hasil produksi. Dalam sistem agribisnis teh, kemitraan berperan sebagai mekanisme koordinasi yang menghubungkan kegiatan budidaya di tingkat petani dengan proses penyerapan hasil dan distribusi produk ke pasar. Perbedaan status dan fungsi lahan pada kemitraan perkebunan dan kehutanan menyebabkan terbentuknya struktur rantai pasok yang berbeda pada masing-masing sistem. Rantai pasok agribisnis merupakan sistem yang menghubungkan aliran produk, informasi, dan finansial dari tingkat produksi hingga konsumen akhir. Dalam sektor pertanian, rantai pasok tidak hanya mencakup proses distribusi hasil panen, tetapi juga koordinasi antar pelaku seperti petani, perusahaan mitra, pedagang, dan pasar (Badawi et al., 2024). Pada praktik kemitraan yang berlangsung di lokasi penelitian, terdapat perbedaan struktur rantai pasok antara pola kerja sama PPTK–PT RPN dan kerja sama dengan PT Perhutani, yang menunjukkan variasi model integrasi pemasaran dan tingkat keterikatan petani terhadap perusahaan mitra. Perbandingan karakteristik kedua model kemitraan tersebut disajikan pada Tabel 4. Perbandingan Model Kemitraan dan Rantai Pasok Usahatani Teh di PPTK PT RPN dan PT Perhutani berikut.

**Tabel 4.** Perbandingan Model Kemitraan dan Rantai Pasok Usahatani Teh di PPTK PT RPN dan PT Perhutani

| Aspek | Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) | Lahan Kehutanan (PT Perhutani) |
|---|---|---|
| Model Kontrak | Centralized contract farming (semi) | Multipartite / network contract farming |
| Pembeli Utama | Satu perusahaan | Banyak mitra |
| Kontrol Perusahaan | Tinggi | Rendah-menengah |
| Struktur Rantai Pasok | Terintegrasi | Jejaring |
| Kebebasan Pasar Petani | Terbatas | Tinggi |
| Stabilitas Pasar | Tinggi | Variatif |

Sumber: Data Primer Wawancara




**Gambar 2.** Struktur rantai pasok pada dua model kemitraan: (a) Struktur rantai pasok di lahan perkebunan; (b) Struktur rantai pasok di lahan kehutanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan sebagaimana dirangkum pada tabel 4 dan divisualisasikan pada gambar 2, struktur rantai pasok pada kemitraan di lahan perkebunan PPTK PT RPN menunjukkan pola yang relatif terintegrasi. Petani mitra melakukan budidaya tanaman teh sebagai komoditas utama yang ditumpangsarikan dengan tanaman hortikultura. Dalam mekanisme pemasaran, hasil produksi teh seluruhnya diserap oleh pihak PPTK PT RPN sebagai (off-taker) sesuai dengan kesepakatan kemitraan, sedangkan hasil tanaman hortikultura dipasarkan secara mandiri

oleh petani ke pasar lokal. Dengan demikian, aliran produk dalam kemitraan ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur terkoordinasi untuk komoditas teh dan jalur pasar terbuka untuk komoditas hortikultura.

Peran PPTK PT RPN sebagai penyerap hasil produksi teh menunjukkan adanya koordinasi vertikal dalam rantai pasok, di mana institusi pengelola berfungsi sebagai pengendali utama dalam menjaga kesinambungan produksi dan pemasaran bahan baku teh. Kepastian penyerapan hasil memberikan jaminan pasar bagi petani serta mengurangi risiko pemasaran pada komoditas utama yang memiliki periode produksi jangka panjang. Sementara itu, kebebasan petani dalam menjual komoditas hortikultura memberikan ruang diversifikasi pendapatan jangka pendek. Struktur ini mencerminkan karakter model contract farming terpusat (centralized model) dengan sifat semi contract farming, di mana perusahaan berperan sebagai pembeli utama untuk komoditas tertentu, namun petani tetap memiliki kebebasan pemasaran pada komoditas lainnya. Pola tersebut sejalan dengan konsep kemitraan agribisnis yang bertujuan mengurangi risiko pemasaran sekaligus mempertahankan fleksibilitas pendapatan petani (Ernita & Rahman, 2023). Dari perspektif rantai pasok, aliran produk dalam sistem ini relatif lebih pendek untuk komoditas teh karena langsung menuju perusahaan mitra. Struktur rantai yang lebih singkat terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemasaran dan memperbesar kepastian penyerapan hasil produksi petani (Renaldi et al., 2025). Sementara itu, pemasaran hortikultura mengikuti mekanisme pasar terbuka melalui pedagang atau pasar tradisional, sehingga rantai distribusinya lebih panjang dan dipengaruhi fluktuasi harga pasar.

Berbeda dengan kemitraan perkebunan, struktur rantai pasok pada kemitraan di kawasan kehutanan PT Perhutani menunjukkan pola yang lebih beragam dan bersifat multi-saluran pemasaran. Petani mitra menanam beberapa komoditas sekaligus, yaitu teh, kopi, dan tanaman hortikultura dalam sistem agroforestri. Hasil produksi teh dipasarkan melalui kerja sama dengan PT Cakra di wilayah Pangalengan, sedangkan komoditas kopi dipasarkan melalui kemitraan dengan pelaku usaha Sunda Hejo. Produk hortikultura dijual langsung oleh petani ke pasar lokal sesuai kondisi permintaan. Dalam sistem agribisnis modern, diversifikasi saluran pemasaran dinilai mampu meningkatkan ketahanan ekonomi petani karena risiko pasar tidak bertumpu pada satu pembeli saja (Nasution & Ningsih, 2024).

Selain komoditas budidaya, pemanfaatan kawasan kehutanan juga menghasilkan getah pinus yang menjadi bagian dari sistem kemitraan dengan PT Perhutani. Hasil getah pinus disetorkan kepada PT Perhutani dan memberikan pendapatan bagi petani melalui sistem bagi hasil dalam bentuk pembayaran uang pada setiap periode panen. Hal ini menunjukkan hubungan kemitraan berbasis pengelolaan sumber daya bersama, bukan sekadar hubungan jual beli. Kolaborasi antar pelaku dalam rantai pasok seperti ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan agribisnis dan stabilitas pendapatan petani (Seo & Kaleka, 2024). Mekanisme ini menunjukkan bahwa rantai pasok dalam kemitraan kehutanan tidak terpusat pada satu komoditas maupun satu aktor pemasaran, melainkan melibatkan beberapa saluran distribusi dengan tingkat koordinasi yang lebih longgar.

Karakter rantai pasok tersebut mencerminkan model kemitraan multipartite/network contract farming, di mana hubungan kerja sama melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, baik sebagai pembeli komoditas maupun pengelola sumber daya lahan. Fleksibilitas pemasaran memberikan peluang diversifikasi sumber pendapatan bagi petani, namun pada saat yang sama meningkatkan eksposur terhadap fluktuasi harga pasar. Berbeda dengan kemitraan perkebunan yang menekankan stabilitas pemasaran komoditas utama, kemitraan kehutanan lebih menonjolkan strategi adaptasi melalui diversifikasi komoditas dan saluran pemasaran.

### *3.6 Manfaat dan Tantangan Pola Kemitraan di Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)*

Pola kemitraan yang diterapkan pada usahatani teh memberikan dampak yang beragam bagi petani maupun pengelola lahan. Kemitraan tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan yang perlu dikelola secara tepat (Ton et al., 2018). Manfaat dan tantangan tersebut berbeda antara lahan perkebunan dan lahan kehutanan karena perbedaan tujuan pengelolaan dan status lahan, yang memengaruhi pengelolaan dan pembagian peran antar aktor (Hariance et al., 2020). Analisis ini penting untuk menilai keseimbangan antara keuntungan, kendala kemitraan dan keberlanjutan pengelolaan lahan (Trimerani et al., 2021). Analisis manfaat dan tantangan pola kemitraan usahatani teh dilakukan dengan membandingkan kepentingan dan implikasi bagi masing-masing pelaku, yaitu PPTK PT RPN, PT Perhutani, dan petani mitra. Perbandingan ini penting untuk memahami sejauh mana kemitraan mampu memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan. Ringkasan manfaat dan potensi permasalahan dari masing-masing pihak disajikan pada Tabel 5. Manfaat dan Tantangan Pola Kemitraan Usahatani Teh pada Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani) berikut.

**Tabel 5.** Manfaat dan Tantangan Pola Kemitraan Usahatani Teh pada Lahan Perkebunan (PPTK PT RPN) dan Kehutanan (PT Perhutani)

| Aktor | Kemitraan Lahan Perkebunan | | Kemitraan Lahan Kehutanan | |
|---|---|---|---|---|
| | **PPTK PT RPN** | **Petani** | **PT Perhutani** | **Petani** |
| **Manfaat** | • Pemanfaatan lahan milik negara menjadi lebih optimal tanpa harus mengelola langsung seluruh kegiatan usahatani.<br>• Pengurangan biaya pengelolaan kebun teh dan tenaga kerja.<br>• Tetap memperoleh hasil produksi teh dari lahan yang dikerjasamakan.<br>• Mendapatkan pendapatan tambahan dari sewa atau kontrak lahan dengan petani mitra. | • Mendapatkan akses lahan untuk berusahatani.<br>• Peningkatan pendapatan melalui sistem tumpangsari (cabai dan hortikultura) yang memiliki masa panen relatif cepat.<br>• Efisiensi penggunaan lahan dan tenaga kerja.<br>• Dukungan teknis berupa bibit teh dan demplot pupuk dari PPTK. | • Lahan negara tetap produktif<br>• Tanaman kehutanan terjaga<br>• Memperoleh bagi hasil 20% dari panen tanpa menanggung biaya produksi | • Mendapatkan akses lahan untuk berusahatani.<br>• Pendapatan stabil dari teh dan kopi<br>• Sistem bagi hasil yang jelas<br>• Fleksibilitas tumpangsari untuk sumber pendapatan |
| **Tantangan/Potensi Masalah** | • Ketergantungan terhadap kepatuhan petani dalam menjalankan perjanjian kemitraan.<br>• Potensi penurunan kualitas lahan apabila pengelolaan tidak sesuai dengan ketentuan teknis.<br>• Perlunya pengawasan dan pendampingan agar kegiatan tumpangsari tidak mengganggu tanaman teh.<br>• Perlunya pengawasan dan pendampingan agar tetap ada tanaman teh yang dibudidayakan. | • Kewajiban pembayaran investasi yang relatif besar sebagai modal awal.<br>• Risiko fluktuasi harga hasil hortikultura yang dapat memengaruhi pendapatan.<br>• Ketergantungan pada keberlanjutan kontrak dan kebijakan dari pihak PPTK. | • Memerlukan pengawasan agar pengelolaan lahan tidak merusak tanaman kehutanan.<br>• Ketergantungan terhadap kepatuhan petani dalam menjalankan perjanjian kemitraan. | • Ketergantungan pada perjanjian jangka panjang<br>• Fluktuasi harga kopi dan teh<br>• Keterbatasan tumpangsari karena regulasi kehutanan. |

Sumber: Data Primer Wawancara

Berdasarkan Tabel 5, kemitraan pada PPTK PT RPN memberikan manfaat utama berupa optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara tanpa harus mengelola seluruh aktivitas usahatani secara langsung. Melalui sistem kemitraan, PPTK tetap memperoleh hasil produksi teh serta pendapatan dari kontrak lahan, sekaligus menekan biaya pengelolaan kebun dan tenaga kerja. Pola ini sejalan dengan temuan Sita et al., (2018) yang menyatakan bahwa contract farming memungkinkan perusahaan perkebunan meningkatkan efisiensi operasional dengan melibatkan petani sebagai mitra pengelola lahan.

Bagi petani mitra PPTK PT RPN, kemitraan memberikan akses terhadap lahan produksi dan peluang peningkatan pendapatan melalui sistem tumpangsari hortikultura yang memiliki masa panen relatif cepat. Selain itu, petani memperoleh dukungan teknis berupa penyediaan bibit dan pendampingan, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan tenaga kerja. Dukungan tersebut juga terlihat dari skema investasi bibit teh yang relatif lebih ringan bagi petani. Secara umum, kebutuhan tanam teh untuk lahan seluas satu hektare mencapai sekitar 10.000 bibit dengan harga rata-rata Rp2.500 per pohon, sehingga total biaya pengadaan bibit dapat mencapai sekitar Rp25.000.000 per hektare. Namun, melalui pola kemitraan ini, petani hanya dibebankan investasi sebesar Rp14.000.000 per hektare. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengurangan beban biaya awal yang cukup signifikan, sehingga kemitraan berperan dalam menurunkan hambatan modal awal (entry cost) bagi petani untuk terlibat dalam usahatani teh.

Namun demikian, petani tetap menghadapi kewajiban investasi awal, meskipun nilainya telah lebih rendah dibandingkan biaya pengadaan bibit secara mandiri. Dengan besaran investasi sebesar Rp14.000.000 per hektare, kemitraan pada dasarnya telah mengurangi hambatan modal awal, tetapi bagi sebagian petani biaya tersebut masih menjadi pertimbangan. Dalam konteks rumah tangga petani kecil, investasi tetap berimplikasi pada risiko arus kas, terutama karena tanaman teh memiliki periode belum menghasilkan yang relatif panjang. Hal ini juga berkaitan dengan adanya ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga komoditas hortikultura (Erfit, 2025).

Pada kemitraan dengan PT Perhutani, manfaat utama yang diperoleh adalah terjaganya produktivitas lahan hutan negara tanpa mengabaikan fungsi konservasi. Sistem bagi hasil memberikan pendapatan bagi perusahaan tanpa harus menanggung seluruh biaya produksi, sekaligus memastikan tanaman kehutanan tetap terlindungi. Skema ini mencerminkan prinsip agroforestri, di mana integrasi tanaman kehutanan dan tanaman budidaya dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya lahan secara berkelanjutan (Zhang & Dong, 2025).

Bagi petani mitra PT Perhutani, kemitraan menyediakan akses lahan usahatani dan sumber pendapatan yang relatif stabil dari komoditas teh dan kopi. Kejelasan sistem bagi hasil menjadi keunggulan utama pola ini. Namun, petani menghadapi keterbatasan dalam penerapan tumpangsari akibat regulasi kehutanan serta ketergantungan pada perjanjian jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kemitraan berbasis kehutanan cenderung membatasi fleksibilitas petani demi menjaga fungsi ekologis lahan (Zhang & Dong, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan memberikan manfaat ekonomi bagi semua aktor, namun juga menyisakan tantangan yang berbeda sesuai dengan tujuan pengelolaan lahan. Kemitraan di lahan perkebunan lebih berorientasi pada optimalisasi produksi dan pendapatan, sedangkan kemitraan di lahan kehutanan menekankan keseimbangan antara produksi dan konservasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pola kemitraan sangat ditentukan oleh kejelasan kontrak, kapasitas petani, dan kesesuaian skema dengan karakteristik lahan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pola kemitraan usahatani teh pada lahan perkebunan dan kehutanan memiliki perbedaan karakteristik yang dipengaruhi oleh status dan fungsi lahan, yang membentuk variasi tingkat formalitas kerja sama serta struktur rantai pasok yang berkembang.
2. Kemitraan PPTK PT RPN menunjukkan pola centralized contract farming, ditandai oleh rantai pasok yang lebih terintegrasi dan peran perusahaan sebagai penjamin pasar komoditas teh, sehingga memberikan kepastian pemasaran bagi petani.
3. Kemitraan PT Perhutani membentuk pola multipartite atau network contract farming, dengan keterlibatan beberapa mitra pemasaran, diversifikasi komoditas, serta sistem bagi hasil produk kehutanan yang menciptakan berbagai sumber pendapatan bagi petani.
4. Kemitraan tidak hanya berfungsi dalam optimalisasi pemanfaatan lahan, pembagian peran dan tanggung jawab antara perusahaan dan petani, tetapi juga berperan dalam membentuk stabilitas pasar, diversifikasi pendapatan, serta strategi pengelolaan risiko ekonomi petani.

**5. Saran**

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji aspek sosial dan lingkungan secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan pola kemitraan usahatani teh di lahan perkebunan dan kehutanan. Sebaiknya juga perlu dilakukan wawancara mendalam kepada pihak PT Perhutani untuk memperkaya informasi yang diperoleh.

**Daftar Pustaka**


Ariani, E., & Rifin, A. (2017). Analisis usahatani kakao pada dua pola tanam polikultur. *Forum Agribisnis*, 7(2), 173–190.

Badawi, I. D., Ilsan, M., & Amri, A. A. (2025). Analisis Rantai Pasok (Supply Chain) Pemasaran Biji Kakao di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Agricentra: Jurnal Sains Agribisnis, 1(3), 226-234.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2026). Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2025. Badan Pusat Statistik Indonesia.

Eaton, C., & Shepherd, A. (2001). Contract farming: Partnerships for growth. Rome, Italy: FAO.

Erfit, E. (2011). Analisis komparatif kemitraan contract farming dan noncontract farming pada agribisnis hortikultura. Jurnal Paradigma Ekonomika, 6(3).

Ernita, A., & Rahman, D. (2024). Pembangunan pertanian dan kemitraan agribisnis berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Jurnal Media Akademik (Jma), 2(1).

Evizal, R., & Prasmatiwi, F. E. (2023). Struktur agroforestri kakao muda dan penerimaan petani di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Jurnal Agrotropika, 22(2), 72–83.

Halik, R. A. F., Rifin, A., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh kemitraan terhadap kinerja usaha mikro dan kecil di Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, 8(2), 164–174.

Hariance, R., Noer, M., Ridwan, E., & Hasnah, H. (2023). Factors affecting teh decision of smallholders tea farmers to join teh cooperative. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 22(1), 129–152.

Kementerian Pertanian. (2026). Statistik ketenagakerjaan sektor pertanian tahun 2026 – Februari 2026. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Laelasari, A. R., Nuraini, C., & Rofatin, B. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Petani Teh Rakyat Pada CV Pusaka Prima di Kecamatan Bojonggambir. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 994–1009.

Media Perkebunan. (2025). Luas, produksi, ekspor teh Indonesia menurun. https://mediaperkebunan.id/berita/luas-produksi-ekspor-teh-indonesia-menurun

Seo, A. Y., & Kaleka, M. U. (2024). Optimasi Mitigasi Risiko Rantai Pasokan Kedelai dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Media Agribisnis, 8 (1), 39–53.

Sita, K., Rosyadi, A. I., & Aji, T. M. (2018). Contract farming through tea–horticulture intercropping system: A case study of Gambung Estate and horticultural farmers in Bandung, Indonesia. Asian Journal of Agriculture and Development, 15(1), 75–85.

Ton, G., Vellema, W., Desiere, S., Weituschat, S., & D'Haese, M. (2018). Contract farming for improving smallholder incomes: What can we learn from effectiveness studies? World Development, 104, 46–64.

Trimerani, R., & Ardiani, F. (2023). Evaluation of teh role of social capital in teh tea farmer partnership system at PT. Pagilaran Afdeling Samigaluh Kulon Progo. Agritepa: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian, 10(2), 357–370.

Zhang, G., & Dong, X. (2025). Effects of agroforestry intercropping on tea yield and soil biochemical functions in teh red soil region of soutehrn China. Sustainability, 17(24), 10994.